

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PARTAI
PERSATUAN PEMBANGUNAN TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014-2019**



Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh:

Nama : Ilham Safroni

NPM : 1221020015

Jurusan: Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
TAHUN 2019 M**

ABSTRAK

Perjuangan partai politik tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan, mempertahankan serta dalam mengisi kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah berkat Rahmat Allah SWT dan merupakan jembatan masyarakat menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT dengan melaksanakan pembangunan spiritual dan material di segala aspek kehidupan bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan itu partai-partai politik sebagai modal dasar pembangunan dan potensi efektif bangsa sangat penting peranannya dalam kehidupan bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah: 1. Sejauh mana Peran Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung ? 2. Bagaimana Peran Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Pandangan Hukum Islam ? Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah: 1. Untuk mengetahui Peran Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung. 2. Untuk mengetahui peran partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pandangan Hukum Islam.

Adapun metode yang digunakan didalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Partai Persatuan Pembangunan telah melakukan Fungsinya selaku partai politik terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung baik berupa peraturan daerah maupun peraturan Gubernur, sesuai dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. 2. Dalam pandangan hukum Islam peran yang sudah dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Ilham Safroni
NPM : 1221020015
Program Studi : Siyasah
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Partai
Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan
Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2019**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs.Susiadi A.S.M.Sos.I
NIP.195808171993031002

Pembimbing II

Eko Hidayat S.Sos., M.H
NIP.197512302003121002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah**

Drs.Susiadi A.S.M.Sos.I
NIP.195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarama 1 Bandar Lampung, 35131 (0721) 79989

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014-2019**, disusun oleh **Ihham Safroni**, NPM : **1221020015**, Jurusan : **Hukum Tata Negara**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden INran Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 29 Juli 2019**.

TIM / DEWAN PENGUJI :

Ketua Sidang : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H** (.....)

Sekretaris : **M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.** (.....)

Penguji I : **Drs. Henri Iwansyah, M.A.** (.....)

Penguji II : **Drs. Susiadi AS, M.Sos.I** (.....)

DEKAN

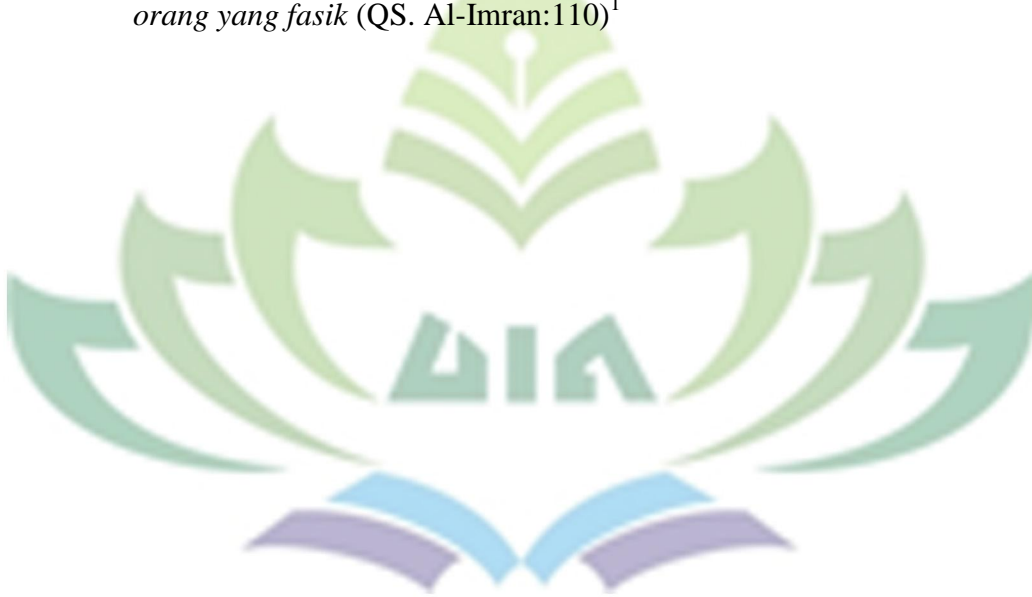
Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ
ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (QS. Al-Imran:110)¹



¹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Semarang:CV. Toha Putra, 1989), h.

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tua ku tercinta, Bapak Toblawi (Alm) dan Ibu Kamalia atas segala pengorbanan, perhatian, kasih sayang, nasehat, serta doa yang selalu mengiringi setiap langkah dalam menggapai cita-citaku.
2. Istriku Dewi Khalimatussa'diyah, anak-anakku Aripin Al Aufa dan Hamdiah Al Iskandari yang senantiasa memberikan semangat dan mendukung diriku dalam mencari ilmu.
3. Kakakku Muslim Anshori, Ayuk-ayukku Hafidzatil Hidayah, Lailuzia, sakdiah, Aslamiah, yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil demi keberhasilanku.
4. Kakek, nenek, paman bibi, serta keluarga besarku yang senantiasa mendoakanku dalam menuntut ilmu.
5. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan, serta mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ilham Safroni. Di lahirkan pada tanggal 7 Maret 1992 di Muara Dua Abung Tinggi Lampung Utara. Merupakan anak ke enam dari enam bersaudara, buah perkawinan pasangan bapak Toblawi (Alm) dan ibunda Kamalia Pendidikan di mulai dari:

1. pendidikan dasar pada sekolah Dasar Negeri 1 Muara Dua pada tahun 1998 sampai 2005.
2. pendidikan Madrasa Tsanawiyah Miftahul Ulum Bukit Kemuning Lampung Utara, pada tahun 2005 sampai 2008.
3. pendidikan Madrasah Aliyah Futuhiya II Bukit Kemuning Lampung Utara, pada tahun 2009 sampai 2012.
4. kemudian pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, selesai pada tahun 2019.
5. Penulis tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada tahun 2012. Tergabung di GP Anshor Lampung Utara pada tahun 2016.

KATA PENGANTAR

Rasa syukur senantiasa kucurahkan kepada Sang Pecipta, Sang pemilik Cinta, Allah SWT. Jika tanpa kuasa-Nya penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014-2019”, Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW manusia yang mengajarkan kepada umat manusia betapa indahnya iman dan islam.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syariah.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
2. Dr. Alamsyah, M. Ag., selaku Dekan dan Fakultas Syariah Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa
3. Drs. Susiadi AS, M.SOS.I dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. yang masing-masing selaku pembimbing 1 dan pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
5. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya di bidang Perpolitikan.

Bandar Lampung, Juli 2019

Penulis

Ilham Safroni
NPM. 1221020015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
G. Metode Penelitian.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran.....	18
1. Definisi Peran	18
2. Teori Peran	18
B. Kebijakan	20
1. Pengertian Kebijakan	20
2. Macam Macam Kebijakan.....	22
3. Dasar Hukum Kebijakan	27
C. Peran Menurut Pandangan Hukum Islam	46

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	60
1. Sejarah	60
2. Struktur Organisasi	63
3. Keadaan Demografi	64
B. Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung	70
1. Arti Penting kebijakan	70
2. Visi dan Misi Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung	71
3. Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung	76
C. Peran Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung	77

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Peran Partai Persatuan Pembangunan
Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung 81
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran
Partai Persatuan Pembangunan pada
Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung 84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 86
- B. Saran..... 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul, sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca.

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul: **"PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014-2019"**.

Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam skripsi ini, yaitu:

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹

Partai Persatuan Pembangunan adalah Partai politik yang berasaskan Islam terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Di

¹ Kumpulan Pengertian Menurut Para Ahli" (On-line), tersedia di: <http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-peran-menurut-para-ahli.html> (11 november 2019)

deklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 *Dzulqa'dah* 1392 H. Partai Persatuan Pembangunan merupakan wahana perjuangan umat Islam Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bertaqwa kepada Allah *Subhanahuwata'ala* dan mengokohkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, menegakkan supremasi hukum, serta menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan dan keadilan sosial berdasarkan pada nilai-nilai keIslaman dan Pancasila².

Kebijakan adalah rangkai konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu.

Provinsi Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera Indonesia, ibu kotanya terletak di Bandar Lampung Provinsi ini memiliki dua kota dan tiga belas kabupaten.

Peran Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014-2019 (Perseptif Hukum Islam) adalah untuk melakukan fungsinya sebagai partai politik dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung baik dalam betuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur.

² Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan tahun 2016, hlm 3

B. Alasan Memilih Judul

Alasan Memilih Judul Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Alasan Objektif

Penulis tertarik untuk mendalami apa saja yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung, yang selama ini merupakan salah satu partai tertua yang berazaskan Islam, yang menurut pandangan penulis peran yang dilakukan oleh partai khususnya Partai Persatuan Pembangunan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung belum adanya transparansi.

b. Alasan Subyektif

Tema penelitian ini sesuai dengan jurusan yang penulis tekuni, yaitu Jinayah Siyasah, selain itu berkaitan dengan topik bahasan tersedia dan literatur yang memadai sehingga penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

C. Latar Belakang

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.³

³ Tim penulis, *Amandemen Undang-Undang Partai politik 2011 UUNo. 2 Th 2011*(jakarta: Sinar Grafika,2011), h. 3.

Terdapat pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara yang demokratis dan di negara yang otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing negara. Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Disisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah dari atas kebawah dan dari bawah ke atas pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang di perintah.

Adapun peran partai politik dalam menyelesaikan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat sangat mempengaruhi dalam hal politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh pemerintahan terhadap pihak-pihak terkait.

Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena di satu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara dalam suatu bursa ide-ide. Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi

pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai “pengeras suara”.⁴

Bahwa sesungguhnya perjuangan partai politik tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan, mempertahankan serta dalam mengisi kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah berkat Rahmat Allah SWT dan merupakan jembatan masyarakat menuju masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Dengan melaksanakan pembangunan spiritual dan material di segala aspek kehidupan bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan itu partai-partai politik sebagai modal dasar pembangunan dan potensi efektif bangsa sangat penting peranannya dalam kehidupan bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, dengan niat ibadah kepada Allah SWT, partai persatuan pembangunan yang berasas Islam melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 zulqaidah 1392 Hijriyah. Bahwa partai persatuan pembangunan merupakan wadah perjuangan umat Islam untuk menegakkan demokrasi serta mewujudkan keadilan sosial dalam negara kesatuan negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila.⁵

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Pustaka Utama, cet 10, 2014, h. 405.

⁵ Dewan Pemimpin Pusat Partai Persatuan Pembangunan, *ketetapan-ketetapan Muktamar IV Partai Persatuan Pembangunan* (Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan, 2014), h.31-32.

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya:

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al An'am:165)⁶

Mengkaji politik dalam Islam harus merujuk pada teks-teks Al-Qur'an (nash) karena didalamnya terkandung sejumlah prinsip berupa keadilan musyawarah, toleransi, hak-hak dan kewajiban, amar makruf dan nahi mungkar, kejujuran, serta penegakan hukum selain itu, peraktek politik Nabi Muhammad SAW juga dapat menjadi sunnah dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Dua sumber normatif ini menjadi dokumen yang menyajikan bagaimana Nabi dan *Khulafa A'rrasiddin* melakukan politik dan pemerintahan di dalam sejarah Islam. Kepemimpinan beliau adalah kepemimpinan moral yang sangat peduli pada perwujudan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Tercatat dalam sejumlah riwayat bahwa pemerintahan Nabi di Madina adalah pemerintahan yang toleran.

⁶ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jawa Barat: Diponegoro, 2006), h. 119.

Toleransi ini terdokumentasikan dalam piagam Madinah yang berintikan antara lain: penghormatan kepada pemeluk agama yang berbeda, hidup bertetangga secara damai, kerja sama dalam keamanan, dan perlindungan bagi pihak-pihak yang teraniaya. Selama Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin negara Madinah ia menjadi pemimpin yang adil dan menerapkan keagungan moral bagi rakyatnya. Itulah sebabnya Aisyah, pernah mengatakan bahwa, “Akhlak Rasulullah adalah Al qur’an” al qur’an dan Sunnahnya menjadi Undang-undang Negara yang mengikat kaum muslim. Walaupun begitu, selain umat Islam, juga dilindungi. Allah SWT Berfirman dalam Qur’an Surat Al Anbiya ayat 107 di sebutkan :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.⁷

Konsep rahmatan lil’alamin adalah konsep toleransi Islam yang hingga sekarang sering dikutip sebagai teologi toleransi yang amat penting dalam relasi Islam dan negara. Dengan demikian, kepemimpinan Nabi adalah cerminan moralitas dan teladan yang indah bagi umat Islam, bahkan umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah model ideal umat yang karir hidupnya dapat memunculkan kearifan-kearifan politik umat. Hingga wafatnya

⁷ *Ibid*, h. 264.

pada Juni 632 M, beliau telah menjadi Nabi- penguasa yang efektif atas sebagian besar semenanjung arabiyah.

Konsep politik Islam bersifat majemuk, yaitu sistem politik Islam yang lahir dari pemahaman seseorang terhadap AL-QUR'AN berdasarkan kondisi kesejarahan dan konteks permasalahan masyarakat para pemikir politik. Sekalipun demikian, tidak masuk akal jika yang mengatakan bahwa Islam yang telah membuat sejarahselama 15 abad tidak mempunyai sistem politik hasil pemikiran para ahlinya. Islam mengingatkan pemeluknya untuk tidak tunduk kepada kekuasaan asing. Inilah sebabnya kaum imperialis berusaha mengacaukan pikiran rakyat dengan menarik garis pemisah antara agama, pemerintahan, dan politik. Padahal, seharusnya ajaran agama dijadikan sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi, dan sumber evaluasi yang kreatif yang membangun insan hukum yang berakhlak mulia. Untuk ini wajib dikembangkan upaya-upaya kongkrit dalam muatan kebijakan pembangunan hukum nasional yang dapat memperkuat landasan budaya keagamaan memfasilitasi perkembangan keberagaman mencegah konflik sosial antar umat beragama.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai hal tersebut dalam bentuk Skripsi dengan judul
PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PARTAI
PERSATUAN PEMBANGUNAN TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014/2019.

⁸ Ayi Sofyan, *EtikaPolitik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 15-21.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang penulis rumuskan adalah:

1. Sejauh manakah Peran Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung ?
2. Bagaimana Peran Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Menurut Pandangan Hukum Islam?

E. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki tujuan sehingga proses dari penulisan ini menjadi terarah dan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam mencari dan pengumpulan data yang ada di lapangan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Sejauh Mana Peran Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Menurut Pandangan Hukum Islam.

F. Kegunaan penelitian

- a. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada akademisi khususnya tentang hukum pidana politik Islam tentang Siyasah hukum Tata Negara berkaitan dengan peran partai persatuan

pembangunan. Disisi lain, meskipun tidak signifikan akan membawa perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan karena dengan penelitian ini akan semakin menambah referensi ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus rujukan dalam peran partai persatuan pembangunan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, khususnya kepada politikus-politikus terkait bagaimana seharusnya peran partai politik terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Adapun metode yang digunakan didalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang berusaha secara maksimal mengungkapkan fakta, lapangan secara kualitatif melalui metode ilmiah dengan teknik pengumpulan data maupun analisis data yang jelas pula.

2. Sifat Penelitian

Dalam membahas permasalahan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan antara lain:

- a. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan teori-teori dan konsep-konsep yang ada dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Pendekatan secara empiris yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan,⁹ yaitu menemukan peran Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung.

Dengan mengadakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris, memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu mengetahui sejauh mana peran Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung. Serta Bagaimana Peran Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Menurut Pandangan Hukum Islam.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data Yaitu:

1. Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (*Field Research*) yang berkaitan dengan peran Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung, data ini diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara mengajukan pertanyaan kepada

⁹ Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Grafindo Persada 2005). Hlm. 82

responden secara bebas menurut irama dan kebijaksanaan wawancara, namun masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah disiapkan secara seksama oleh pewawancara¹⁰

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada diluar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang,¹¹ yaitu Alquran dan Hadist, Kamus bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Buku-buku, Majalah-majalah, Artikel Internet dan sumber yang berkenaan dengan penelitian ini.

4. Populasi

Dalam kerangka penelitian (terutama sekali penelitian kuantitatif), populasi merupakan salah satu hal yang esensial dan perlu mendapat perhatian dengan saksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah (area) atau objek penelitiannya. Sax menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan manusia yang terdapat dalam area yang telah ditetapkan, sedangkan Truckman mengemukakan bahwa populasi atau target populasi adalah kelompok dari mana peneliti mengumpulkan informasi dan kepada siapa kesimpulan akan digambarkan. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi

¹⁰ Cholid Narbuto, Metode Penelitian (Jakarta: Bumiaksara, 2013), h, 83

¹¹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Jakarta: Alfabeta, 2009), h, 225.

juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek dan obyek yang diteliti itu.¹² Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengurus dewan pimpinan wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung yang berjumlah 55 orang.

5. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Secara sederhana sampel dapat dikatakan, bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Sebagian dan mewakili dalam batasan diatas merupakan dua kata kunci dan merujuk pada semua ciri populasi dalam jumlah yang terbatas pada masing-masing karakteristiknya, Ciri-ciri sampel yang baik sebagai berikut:

- a. Sampel dipilih dengan cara hati-hati, dengan menggunakan cara tertentu dengan benar.
- b. Sampel harus mewakili populasi, sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi.
- c. Besarnya ukuran sampel hendaklah mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditoleransi dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik¹³

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.119.

¹³ Ibid, h. 146-161.

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling purposive. Menurut Sugiono, sampling purposive adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.¹⁴

Adapun Sampel yang ditunjuk oleh penulis dalam penelitian ini adalah sejumlah 7 orang dari total populasi yang ada.

6. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian di kantor Dewan pimpinan wilayah partai persatuan pembangunan provinsi lampung. Data primer dari penulisan ini diperoleh dengan mengadakan wawancara kepada ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Lampung, ketua harian Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung, ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung. Data ini diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin, artinya pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijaksanaan wawancara, namun masih dipimpin oleh

¹⁴ Ibid, h. 60

garis besar kerangka pertanyaan yang telah disiapkan secara seksama dengan pembahasan oleh pewawancara.¹⁵

2. Pengumpulan Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber lain yang berada diluar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari buku-buku, Undang-undang dasar 1945, Undang-undang No. 2 Th. 2011 tentang Partai Politik, AD ART Partai Persatuan Pembangunan, sistem politik di Indonesia dan bahan-bahan buku sekunder seperti Al-Qur'an dan hadist kamus bahasa Indonesia. Dalam data sekunder digunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan lain sebagainya. Pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian serta dengan melihat keterangan tentang Peran Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung.

b. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, dengan cara antara lain:

1. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu memeriksa ulang dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan

¹⁵ Cholid Narbuto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 83.

makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian¹⁶

2. Koding, Yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden kedalam kategori-kategori. Atau memberikan catatan yang menyatakan jenis sumber atau urutan rumusan masalah.
2. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis¹⁷
3. Sistematika data (*sistemazing*) yaitu bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁸ Adapun metode berfikir yang dipakai pada penelitian ini adalah metode induktif atau mengumpulkan bukti-bukti khusus yang kemudian ditarik suatu

¹⁶ Cholid Narbuto, Op.,Cit, h 153

¹⁷ *Ibid*, h, 115

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cet-16, 2012), h. 241.

kesimpulan yang bersifat umum. Setelah dilakukan penelitian, data yang terkumpul masih merupakan data mentah sehingga perlu diolah dan dianalisis terlebih dahulu guna menghasilkan sebuah informasi yang teruji kevalidannya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran

1. Definisi Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Pengertian peran yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹

2. Teori peran

Teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan berperilaku secara tertentu.²

¹ Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 98

² Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran yang didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.³

³ Horoepoetri, Arimbi, Ahcmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat dalam Mengelola Lingkungan*, (Jakarta: Walhi, 2003)

B. Kebijakan

1. Pengertian kebijakan

Kebijakan merupakan kata yang sering kita dengar, kita ucapkan atau bahkan kita lakukan. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan mengambil keputusan. Kata kebijakan itu berasal dari bahasa Indonesia sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah '*policy*'. Adapun pengertian kebijakan itu sendiri dapat dilihat dari segi bahasa yaitu kebijakan atau policy yang berasal dari bahasa Inggris artinya "kebijaksanaan" (wisdom) maupun 'kebijakan' (virtues).⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia⁵ mengemukakan bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.⁶

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu

⁴ Edi Suharto, *Analisis kebijakan publik* (Bandung: Cv. Alfabeta, 2015), h.7.

⁵ KBBI, "Pengertian Kebijakan" "Online" Diakses Melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, 14 Januari 2018.

⁶ Syaiful Sagala, *administrasi pendidikan kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.96.

rencana.⁷ Pengertian kebijakan juga didefinisikan oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

- a. Nugroho mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi⁸.
- b. Friedrich dalam Wahab mengartikan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan⁹.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

⁷ Sholichin Abdul Wahab, *Analisis kebijaksanaan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004),h.2.

⁸ Nugroho D, Riant, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta : Penerbit PT Elex Media Komputindo,2007) h.7,

⁹ Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Penerbit P.T. Bumi Aksara, 1997).h.12

2. Macam-macam kebijakan

Pada dasarnya kebijakan dibedakan menjadi tiga macam. Adapun macam-macam kebijakan, yaitu sebagai berikut:

a. Kebijakan sosial

Kebijakan sosial terdiri dari dua kata yang memiliki banyak makna, yakni kata 'kebijakan' dan kata 'sosial' (*social*). Kata sosial berkaitan dengan hak azasi manusia baik individu maupun anggota masyarakat. Misalnya, selain setiap orang memiliki hak azasi (*human right*), seperti hak hidup yang menyatakan pendapat secara bebas, juga memiliki hak sosial (*social right*), seperti kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, perumahan, atau berpartisipasi dalam pembangunan.¹⁰

Kebijakan sosial diartikan sebagai kebijakan yang menyangkut aspek sosial, yakni yang menyangkut bidang kesejahteraan sosial.

Pengertian kebijakan sosial menurut beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Magill mendefinisikan Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan publik (*public policy*). Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik). Kebijakan sosial

¹⁰ Edi Suharto, *Op.Cit.*, h.7.

merupakan satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial¹¹.

- 2) Marshall mengatakan bahwa kebijakan sosial adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan pelayanan sosial atau bantuan keuangan.
- 3) Rein menyebutkan bahwa kebijakan sosial adalah perencanaan untuk mengatasi biaya-biaya sosial, peningkatan pemerataan, dan pendistribusian pelayanan dan bantuan sosial.
- 4) Huttman mengatakan bahwa kebijakan sosial adalah strategi-strategi, tindakan-tindakan atau rencana-rencana untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.
- 5) Spicker mendefinisikan kebijakan sosial sebagai kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan (*welfare*), baik dalam arti luas, yang menyangkut kualitas hidup manusia, maupun dalam arti sempit, yang menunjuk pada beberapa jenis pemberian pelayanan kolektif tertentu guna melindungi kesejahteraan rakyat.
- 6) Hill mengatakan bahwa kebijakan sosial adalah studi mengenai peranan negara dalam kaitannya dengan kesejahteraan warganya.¹²

¹¹ Budi Toyota, *Definisi Kebijakan Sosial*, Diakses melalui <https://kebijakansosial.wordpress.com>, (14 Januari 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹² Edi Suharto, *Op. Cit.*, h.10.

Kata sosial yang didefinisikan oleh para ahli diatas, meunjukkan pada ‘manfaat-manfaat’ atau ‘bantuan-bantuan’ kesejahteraan sosial yang tercakup dalam pengertian ini antara lain meliputi: perlindungan sosial (social protection) bagi kelompok-kelompok rentan dan tidak beruntung; jaminan sosial (social security) baik yang berbentuk bantuan sosial (social assistance) maupun asuransi sosial (social insurance).

b. Kebijakan publik

Kebijakan publik meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik). Kebijakan sosial merupakan satu tipe kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial.¹³

Para ahli yang memberikan definisi mengenai kebijakan publik antara lain.

- a) Robert Eyestone, mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya;
- b) Thomas R. Dye, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan;
- c) Richard Rose, menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta

¹³ Edi Suharto, *Analisis kebijakan publik* (Bandung: Cv. Alfabeta, 2015), h.10.

konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri;

- d) Carl Friedrich, memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu;
- e) James Anderson, kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan¹⁴. Secara konseptual ditinjau dari Kamus Administrasi Publik, Chandler dan Plano menegaskan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pemerintahan¹⁵.
- f) Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Ini berarti kebijakan publik tidak boleh

¹⁴ Budi Winarno, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), h.14-16

¹⁵ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*. (Bandung : Alfabeta, 2008), h.38-39

bertentangan dengan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan peraktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁶

Budi Winarno¹ dan Sholichin Abdul Wahab² sepakat bahwa istilah 'kebijakan' ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*.¹⁷

c. Kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Bank Sentral) untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Sejak tahun 1945, kebijakan moneter hanya digunakan sebagai kebijakan ekonomi untuk mencapai stabilitas ekonomi jangka pendek. Adapun kebijakan fiskal digunakan dalam pengendalian ekonomi jangka panjang. Namun pada saat ini kebijakan moneter merupakan kebijakan utama yang dipergunakan untuk pengendalian ekonomi jangka pendek dan jangka panjang.¹⁸

¹⁶ Subarsono, *Analisis kebijakan publik* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 2

¹⁷ Sholichin Abdul wahab, *Analisis kebijaksanaan* (Jakarta: Bumi aksara, 2004),h.1.

¹⁸ Muhammad, dan kebijakan fiskal moneter dalam ekonomi islam (jakarta: selemba empat, 2002),

3. Dasar hukum kebijakan

a. Freies Ermessen

Keberadaan peraturan kebijakan tidak dapat di lepaskan dengan kewenangan bebas (*vrije bevoegdheid*) dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah Freies Ermessen. Karena itu sebelum menjelaskan peraturan kebijakan, terlebih dahulu dikemukakan mengenai Freies Ermessen ini.

Secara bahasa Freies Ermessen berasal dari kata *Frei* artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. *Freies* artinya orang yang bebas,lepas, tidak terikat, dan merdeka. Sedangkan *Ermessen* berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. Freies Ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemeritahan, Freies Ermessen diartikan salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan – badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Definisi lain yang hampir senada diberikan oleh Nana saputra, yakni suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenalkan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum, atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas - tugas menyelenggarakan kepentingan

umum.¹⁹ Bachsan Mustafa menyebutkan bahwa, *Freies Ermessen* diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau administrasi negara yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antar penduduk. Keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan atas sasarannya daripada sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁰

Meskipun pemberian *Freies Ermessen* kepada pemerintah atau administrasi negara merupakan konsekuensi logis dari konsepsi *welfare state*, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, *Freies Ermessen* ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu, Sjahran Basah mengemukakan *Freies Ermessen* dalam suatu negara hukum yaitu sebagai berikut.²¹

- 1). Ditujukan untuk menjalankan tugas – tugas servis publik.
- 2). Merupakan sikap tindakan yang aktif dari administrasi negara.
- 3). Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum.
- 4). Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri.
- 5). Skap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan – persoalan penting yang timbul secara tiba – tiba.
- 6). Sikap tindak itu dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.

¹⁹ *Ibid*, h, 57

²⁰ *Ibid*, h, 59

²¹ *Ibid*, h, 60

Freies Ermessen ini muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas. Bagi negara yang bersifat *welfare state*, asas legalitas saja tidak cukup untuk dapat berperan secara maksimal dalam melayani kepentingan masyarakat, yang berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Menurut Laica Marzuki, Freies Ermessen merupakan kebebasan yang diberikan kepada tata usaha negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan meningkatnya tuntutan pelayanan publik yang harus diberikan tata usaha negara terhadap kehidupan sosial ekonomi para warga yang kian kompleks. Freies Ermesse merupakan hal yang tidak terelakkan dalam tatanan tipe negara kesejahteraan modern, terutama dikala menjelang akhir abad XX dewasa ini. Era globalisasi sesudah tahun 2000 menjadikan tata usaha negara semakin memperluas penggunaan Freies Ermessen yang melekat pada jabatan publiknya. Di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, Freies Ermessen dilakukan oleh administrasi negara dalam hal – hal sebagai berikut.²²

- a) Belum ada peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang penyelesaian in konkrito terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Misalnya dalam menghadapi suatu bencana alam ataupun wabah penyakit menular, maka aparat pemerintah harus segera mengambil tindakan

²² Herabudin, Studi kebijaksanaan Pemerintah (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h, 105

yang menguntungkan bagi negara maupun bagi rakyat, tindakan mana semata – mata timbul atas prakarsa sendiri.

- b). Peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. Misalnya pemberian izin bebas untuk menafsirkan pengertian “menimbulkan keadaan bahaya “ sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing – masing.
- c). Adanya delegasi perundang – undangan, maksudnya pemerintah diberikan kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya dalam menggali sumber – sumber keuangan daerah. Pemerintah daerah bebas untuk mengelolanya asalkan sumber – sumber itu merupakan sumber yang sah.

Freies Ermessen ini bertolak dari kewajiban pemerintah dalam welparesatate dimana tugas pemerintah yang utama adalah memberikan pelayanan umum atau mengusahakan kesejahteraan bagi warganegara, disamping memberikan perlindungan bagi warga negara. Apabila dibandingkan dengan negara kita, freies ermessen muncul bersamaan dengan pemberian tugas kepada pemerintah untuk merealisasi tujuan negara seperti yang tercantum dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945. Oleh karena tugas utama pemerintah dalam konsepsi welparesatate itu memberikan pelayanan bagi warga negara, maka muncul prinsip “pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau belum/ tidak ada peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum”.²³

Meskipun kepada pemerintah diberikan kewenangan bebas atau *freies ermessen*, namun dalam suatu negara hukum penggunaan *freies ermessen* harus dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku. Penggunaan *freies ermessen* tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Mohsan pembatasan penggunaan *freies ermessen* adalah sebagai berikut;

- 1) Penggunaan *freies ermessen* tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif).
- 2) Penggunaan *freies ermessen* hanya ditujukan demi kepentingan umum.

Sjachran Basah berpendapat bahwa pelaksanaan *freies ermessen* tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan, “secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama.” Lebih lanjut Sjachran Basah mengatakan bahwa secara hukum terdapat dua batas; batas atas dan batas bawah. Batas atas dimaksudkan ketaatan-asas ketentuan perundang-

²³ *Ibid*, h, 98

undangan berdasarkan asas taat asas, yaitu peraturan yang tingkat derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkat derajatnya lebih tinggi. Sedangkan batas bawah ialah peraturan yang dibuat atau sikap tidak administrasi negara (baik aktif maupun pasif), tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga. Dapat ditambahkan bahwa *freies ermessen* itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.²⁴

Dalam ilmu hukum administrasi negara, *freies ermessen* ini diberikan hanya kepada pemerintah atau administrasi negara baik untuk melakukan tindakan-tindakan biasa maupun tindakan hukum, dan ketika *freies ermessen* ini diwujudkan dalam instrumen yuridis yang tertulis, jadilah ia sebagai peraturan kebijakan. Sebagai sesuatu yang lahir dari *freies ermessen* dan yang hanya diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara, kewenangan pembuatan peraturan kebijakan itu inheren pada pemerintahan (*inheren aan hed bestuur*).

b. Pengertian peraturan kebijakan

Didalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi negara, pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang di tuangkan dalam berbagai bentuk seperti *beleidslijen* (garis-garis kebijakan), *het beleid* (kebijakan), *voorschriften* (peraturan-peraturan), *richtlijnen* (pedoman-pedoman), *regelingen* (petunjuk-petunjuk), *circulaires* (surat edaran),

²⁴ *Ibid*, h, 120

resoluties (resolusi-resolusi), aan schrijvingen (intruksi-intruksi), beleidesnota's (nota kebijakan), reglemen (ministriele) (peraturan-peraturan mentri), beshchikikingen (keputusan-keputusan), enbekenmakingen (pengumuman-pengumuman). Menurut philipus M. Hadjon peraturan kebijakan pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan “naar buiten gebracht schricftelijk beleid”, yaitu menampakan keluar suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijakan hanya berpungsi sebagai bagian dari oprasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, karenanya tidak dapat mengubah ataupun menyimpang peraturan perundang-undangan.²⁵ Peraturan ini adalah semacam hukum bayangan dari undang-undang atau hukum. Oleh karena itu, peraturan ini disebut pula dengan istilah pseudo-wedgeving (perudang-undangan semu) atau sepigelsrecht (hukum bayangan/cermin).

Secara praktis kewenangan diskresioner administrasi negara yang kemudian melahirkan praturan kebijakan, megandung dua aspek pokok: pertama, kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya. Aspek pertama ini lazim dikenal dengan kebebasanab menilai yangbersifat objektif. Kedua, kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi negara itu dilaksanakan. Aspek kedua ini dikenal dengan kebebasan menilai yang

²⁵ Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), h, 56

bersifat subjektif. Kewenangan bebas untuk menafsirkan secara mandiri dari pemerintah inilah yang melahirkan peraturan kebijakan P.J.P. Tak menjelaskan peraturan kebijakan.

(peraturan kebijakan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan berkenaan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintah lainnya dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam UUD dan undang-undang formal baik langsung maupun tidak langsung. Artinya peraturan kebijakan tidak didasarkan kewenangan pembuatan undang-undang dan oleh karena itu tidak termasuk peraturan perundang-undangan yang mengikat umum tetapi dilekatkan negara dan terkait dengan pelaksanaan kewenangan)

Berkenaan dengan peraturan kebijakan ini, ada baiknya dikemukakan tulisan J.B.J.M. ten Berge. (peraturan kebijakan diartikan suatu keputusan, dengan isi aturan tertulis yang mengikat umum, yang memberikan aturan umum berkenaan dengan pertimbangan kepentingan, penetapan fakta – fakta atau penjelasan peraturan tertulis dalam penggunaan suatu wewenang organ pemerintah. Peraturan kebijakan juga mengenal ketentuan umum sebagai elemen penentuan konsep. Perbedaan utama peraturan kebijakan dengan peraturan perundang – undangan adalah pembuatan

aturan umum peraturan kebijakan ini tanpa kewenangan pembuat peraturan perundang – undangan).²⁶

Commissie wetgevingsvraagstukken merumuskan peraturan kebijakan sebagai, “ *een algemene regel omtrent de uitoefening van een bestuursbevoegdheid jegens de bestuurden (burgers, maar ook andere bestuursorganen), op eigen gezag vastgesteld door de bevoegd bestuursinstantie zelf of door een hierarchisch hogere bestuursinstantie*”

(suatu peraturan umum tentang pelaksanaan wewenang pemerintah terhadap warga negara { warga negara juga organ pemerintah lainnya} di tetapkan berdasarkan kekuasaan sendiri oleh instansi pemerintahan yang berwewenang atau instansi pemerintah yang secara hierarki lebih tinggi). Peraturan kebijakan secara esensial berkenaan dengan; pertama, *een bestuursorgaan met in casu uitsluitend de bevoegdheid tot het verrichten van bestuursandelingen* (organ pemerintahan dalam hal ini semata-mata menggunakan kewenangan untuk menjalankan tindakan-tindakan pemerintah) ; kedua, *een bestuursbevoegdheid* terikat secara tegas); ketiga, *algemene regels, te hanteren bij de uitoefening van de bevoegdheid* (ketetapan umum, digunakan ada pelaksanaan kewenangan).²⁷

²⁶ *Ibid*, h, 62

²⁷ Ridwan HR, *hukum administrasi negara* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 169-177.

c. Unsur-unsur keputusan kebijakan

Berdasarkan beberapa definisi dari para sarjana tersebut, tampak ada beberapa unsur yang terdapat dalam *beschikking*, yaitu; a) pernyataan kehendak sepihak; b) dikeluarkan oleh organ pemerintahan c) didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik d) ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa kongkret dan individual e) dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi.

Sebelum menguraikan unsur-unsur keputusan ini, terlebih dahulu dikemukakan pengertian keputusan berdasarkan pasal 2 undang-undang administrasi belanda (AwB) dan menurut pasal 1 angka 3 undang-undang no. 5 tahun 1986 tentang PETUN jo UU No.9 tahun 2004 tentang perubahan undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang PETUN, yaitu sebagai berikut.

(pernyataan kehendak tertulis secara sepihak dari organ pemerintahan pusat, yang diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari hukum tata negara atau hukum administrasi negara, yang dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan, atau pengakhiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru, yang memuat penolakan sehingga terjadi penetapan, perubahan, penghapusan, atau penciptaan). Berdasarkan definisi ini tampak ada enam unsur keputusan yaitu sebagai berikut;

- a) suatu pernyataan kehendak tertulis.
- b) Diberikan berdasarkan kewajiban atau kewenangan dari hukum tata negara atau hukum administrasi.
- c) Bersifat sepihak.
- d) Dengan mengecualikan keputusan yang bersifat umum.
- e) Yang dimaksudkan untuk penentuan, penghapusan, atau pengahiran hubungan hukum yang sudah ada, atau menciptakan hubungan hukum baru, yang memuat penolakan, sehingga terjadi penetapan perubahan, penghapusan, atau penciptaan.
- f) Berasal dari organ pemerintahan.²⁸

d. Syarat-syarat pembuatan keputusan

Pembuatan keputusan tata usaha negara harus memerhatikan beberapa persyaratan agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum (*rechtsgeldig*) dan memiliki kekuatan hukum (*rechtskracht*) untuk dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan keputusan ini mencakup syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan keputusan ini mencakup syarat materiil dan syarat formal.

a) Syarat-syarat materiil terdiri atas:

- 1) Organ pemerintah yang membuat keputusan harus berwenang.
- 2) Karena keputusan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan-

²⁸ Ridwan HR, *Op.Cit.*,h.143-145

kekurangan yuridis (*gen juridische gebreken in de wilsvorming*), seperti penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*) atau suap (*omkoping*), kesesatan (*dwaling*).

- 3) Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu.
- 4) Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya.²⁹

b) Syarat-syarat formal terdiri atas:

- 1) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi.
- 2) Keputusan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam perturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkan keputusan itu.
- 3) Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi.
- 4) Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkanannya keputusan itu harus diperhatikan.³⁰

²⁹ *Ibid*, h, 74

³⁰ *Ibid*, h, 83

Apabila syarat materiil dan syarat formil ini telah terpenuhi, maka keputusan itu sah menurut hukum (*rechtsgeldig*), artinya dapat diterima sebagai suatu bagian dari tertib hukum atau sejalan dengan ketentuan hukum yang ada baik secara prosedural/formal itu tidak terpenuhi, maka keputusan itu mengandung kekurangan dan menjadi tidak sah. F.H. van der burg dan kawan-kawan menyebutkan bahwa keputusan dianggap tidak sah jika dibuat oleh organ yang tidak berwenang (*onbevoegdheid*), mengandung cacat bentuk (*vormgebreken*), cacat isi (*inhoudsgebreken*), dan cacat kehendak (*wilsgebreken*). A.M. Donner mengemukakan akibat-akibat dari keputusan yang tidak sah yaitu sebagai berikut;

- a) Keputusan itu harus dianggap batal sama sekali.
- b) Berlakunya keputusan itu dapat digugat
- c) Dalam hal keputusan tersebut, sebelum dapat berlaku, memerlukan persetujuan (peneguhan) suatu badan kenegaraan yang lebih tinggi, maka persetujuan itu tidak diberi.
- d) Keputusan itu diberi tujuan lain daripada tujuan pemulaannya (*conversie*).³¹

³¹ *Ibid*, h, 86

Van der wel menyebutkan enam macam akibat suatu keputusan yang mengandung kekurangan, yaitu sebagai berikut;

- a) Batal karena hukum.
- b) Kekurangan itu menjadi sebab atau menimbulkan kewajiban untuk membatalkan keputusan itu untuk sebagiannya atau seluruhnya.
- c) Kekurangan itu menyebabkan bahwa alat pemerintah yang lebih tinggi dan yang berkompeten untuk menyetujui atau meneguhkannya, tidak sanggup memberi persetujuan tau peneguhan itu.
- d) Kekurangan itu tidak memengaruhi berlakunya keputusan.
- e) Karena kekurangan itu, keputusan yang bersangkutan dikonversi ke dalam keputusan lain.
- f) Hakim sipil (biasa) menganggap keputusan yang bersangkutan tidak mengikat.

Meskipun suatu keputusan itu dianggap sah dan akan menimbulkan akibat hukum perdata, akan tetapi keputusan yang sah itu tidak dengan sendirinya berlakuk, karena untuk berlakunya suatu keputusan harus memerhatikan tiga hal sebagai berikut; pertama, jika berdasarkan peraturan dasarnya terhadap keputusan itu tidak memberi kemungkinan mengajukan permohonan banding bagi yang dikenai keputusan, maka keputusan itu mulai berlaku sejak saat diterbitkan (*ex nunc*).; kedua, jika berdasarkan peraturan dasarnya terdapat kemungkinan untuk mengajukan banding terhadap keputusan itu

tergantung dari proses banding itu. Kranenbrugg dan Vegting menyebutkan empat cara mengajukan permohonan banding terhadap keputusan, yaitu sebagai berikut;


- a) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan keputusan pada tingkat banding, di mana kemungkinan itu ada.
- b) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah supaya keputusan itu dibatalkan.
- c) Pihak yang dikenai keputusan itu dapat mengajukan masalahnya kepada hakim biasa agar keputusan itu dinyatakan batal karena bertentangan dengan hukum.
- d) Pihak yang dikenai keputusan itu dapat, apabila karena tidak memnuhinya keputusan itu, berusaha untuk memperoleh keputusan dari hakim seperti yang dimaksudkan dalam bagian c.

Pada umumnya batas waktu mengajukan banding itu ditentukan dalam peraturan dasar yang terkait dengan keputusan itu. Jika batas waktu banding telah berakhir dan tidak digunakan oleh mereka yang dikenai keputusan itu, maka keputusan itu mulai berlaku sejak saat berakhirnya batas waktu banding; ketiga, jika keputusan itu memerlukan pengesahan dari organ atau instansi pemerintahan yang lebih tinggi, maka keputusan itu mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan. Berkenan dengan pengesahan atau persetujuan ini terdapat tiga pendapat, yaitu sebagai berikut;

- a) Karena berhak untuk memberikan persetujuan, mahkota (pemerintah) menjadi pembuat serta undang-undang, jadi merupakan hak pengukuhan.
- b) Hak memberikan persetujuan adalah hak placet, artinya melepaskan tanggung jawab (jadi, pernyataan dapat dilaksanakan).
- c) Persetujuan merupakan tindakan terus menerus, artinya tidak berakhir pada saat diberikan, tetapi dapat ditarik kembali selama yang disetujuinya masih berlaku.

Keputusan yang sah dan telah dapat berlaku dengan sendirinya akan memiliki kekuatan hukum formal (*formeel rechtskracht*) dan kekuatan hukum materiil (*materiele rechtskracht*). Kekuatan hukum formal suatu keputusan ialah pengaruh yang dapat diadakan oleh karena adanya keputusan itu. Suatu keputusan mempunyai kekuatan hukum formal bilamana keputusan itu tidak lagi dapat dibantah oleh suatu alat hukum (*rechtsmiddel*). Dengan kata lain, keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum formal itu tidak dapat dibantah baik oleh pihak yang berkepentingan, oleh hakim, organ pemerintahan yang lebih tinggi, maupun organ yang membuat keputusan itu sendiri (*zowel door belanghebbende, door een hoger bestuursorgaan, als door het beschikking organ zelf*). Keputusan tata usaha negara itu memiliki kekuatan hukum formal dalam dua hal; pertama, keputusan tersebut telah mendapat persetujuan untuk berlaku dari alat negara yang lebih tinggi yang berhak memberikan persetujuan tersebut; kedua, suatu

keputusan di mana permohonan untuk banding terhadap keputusan itu ditolak atau karena tidak menggunakan hak bandingnya dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum materiil adalah pengaruh yang dapat diadakan oleh karena isi materi dari keputusan itu. E. Utrecht menyebutkan bahwa suatu keputusan itu tidak lagi dapat ditiadakan oleh alat negara yang membuatnya. Kecuali peraturan perundang-undangan memberikan kemungkinan kepada pemerintah atau administrasi negara untuk meniadakan keputusan tersebut.³²



Keputusan yang sah dan sesudah dinyatakan berlaku, di samping mempunyai kekuatan hukum formal dan materiil, juga akan melahirkan prinsip praduga *rechmatig* (*het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*). Prinsip ini mengandung arti bahwa “setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi negara itu dianggap sah menurut hukum” asas praduga *rechmatig* ini membawa konsekuensi bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (*vernietiging*) dari pengadilan. Lebih lanjut, keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak dapat ditunda pelaksanaannya meskipun terdapat keberatan (*bezwaar*),

³² AG. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik, (Jogja:PustakaPelajar, 2016), h, 43

banding (*beroep*), perlawanan (*bestreden*) atau gugatan terhadap suatu keputusan oleh pihak yang dikenai keputusan tersebut.

Asas praduga *rechtmatic* ini dianut pula oleh UU No.5 tahun 1986 tentang PTUN jo UU No.9 tahun 2004, tentang perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN, sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 ayat (1); “gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara yang digugat”. Dalam penjelasannya antara lain disebutkan, “akan tetapi selama hal itu belum diputus oleh pengadilan, maka keputusan tata usaha negara harus dianggap menurut hukum. Dalam proses dimuka pengadilan tata usaha negara memang dimaksudkan untuk menguji apakah dengan bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak. Itulah dasar hukum acara tata usaha negara yang bertoalk dari anggapan bahwa keputusan tata usaha negara itu selalu menurut hukum. Dari segi perlindungan hukum, maka acara tata usaha negara yang merupakan sarana hukum, maka hukum acara tata usaha negara yang merupakan sarana hukum dalam keadaan konkret meniadakan anggapan tersebut. Oleh karena itu, pada dasarnya selama hal tersebut belum diputuskan tata usaha negara yang digugat itu tetap dianggap menurut hukum dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu, penggugatan dapat mengajukan permohonan agar selama proses berjalan, keputusan tata usaha negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaanya”.

Asas praduga *rechtmatic* tersebut berkaitan erat dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) yang terdapat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yang menurut SF. Marbun asas kepastian hukum ini menghendaki;

“dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan badan/pejabat administrasi negara dan keputusan itu tidak akan dicabut kembali oleh badan/pejabat administrasi negara, meskipun surat keputusan itu mengandung kekurangan. Jika pejabat administrasi negara dapat sewaktu-waktu mencabut atau membatalkan surat keputusan yang telah dikeluarkannya, tindakan demikian kecuali dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh badan/ pejabat administrasi. Masyarakat akan selalu di bayangi keraguan terhadap hak yang telah diperolehnya, karena hak tersebut sewaktu-waktu dapat saja dicabut atau dibatalkan kembali oleh badan/pejabat administrasi negara yang mengeluarkannya maupun oleh atasannya”.³³

Meskipun diasumsikan bahwa setiap keputusan yang telah dikeluarkan dianggap sah menurut hukum, akan tetapi didalam praktik hampir semua surat keputusan, khususnya dalam praktik administrasi di indonesia, terdapat klausula pengamanan (*veiligheidsclausule*) yang pada umumnya berbunyi; “apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka surat keputusan ini akan ditinjau

³³ *Ibid*, h, 63

kembali". Dengan kata lain, klausula pengaman itu merupakan suatu hal yang keliru, tidak bermanfaat dan mubajir, sebab dapat menggoyahkan sendi-sendi kepastian hukum.³⁴

C. Peran Menurut Pandangan Hukum Islam

1. Alquran

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam pertama dan utama, ia memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti dan dikembangkan lebih lanjut. Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman Allah) yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekah, kemudiannya dimadinah untuk menjadi pedoman bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat

QS. Al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"

³⁴ Ridwan HR, *Op. Cit.*, h.161-168.

QS. Al-Dzariyat ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku

QS. An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
، تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat

2. As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, yang berupa perkataan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), dan ketetapan (*taqrir*) Rasulullah SAW. Yang tercatat dalam kitab-kitab hadis. Hadis merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Qur'an. Kitab-kitab hadis adalah sumber pengetahuan yang monumental tentang Islam yang komplementer terhadap Al-Qur'an. As-Sunnah membahas berbagai hal, mulai dari metafisika, krismologi, eskatologi sampai hal-hal yang

berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, hukum, sosial, ekonomi, dan politik

Hadist Muttafaqun 'Alaih

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
كَلَّكُمْ رَاعٍ وَكَلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى
أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكَلَّكُمْ رَاعٍ وَكَلَّكُمْ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه)

Artinya:

Hadis Dari ‘Abdullah bin ‘Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda: “Setiapkalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala Negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut” (Muttafaqun 'Alaih).

3. Prinsip-prinsip hukum Islam

Pengertian prinsip secara bahasa adalah permulaan, titik tolak, atau al-mabda. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, sedangkan prinsip khusus adalah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam tersebut adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid

Tauhid adalah prinsip hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid, yang dinyatakan dalam kalimat “*la ila ha illa al-lah*” (tidak ada tuhan selain Allah). Berdasarkan prinsip ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manifestasi pengakuann atas ke-mahaesaan-nya dan manifestasi kesyukuran kepadanya. Dengan demikian, tidak boleh terjadi saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya.

b. Prinsip keadilan (al-‘adl)

Terma keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadila dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan individu dengan hakim dan yang berpekara serta hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. Allah swt. Memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Perintah berlaku adil ditunjukkan kepada setiap orang tanpa pandang bulu.

c. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Amar ma'ruf berarti hukum Islam digerakan untuk dan merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik dan benar, yang dikehendaki dan diridai Allah. Dalam filsafat hukum barat, Amar ma'ruf diartikan sebagai fungsi *social engineering* hukum. Adapun nahi munkar dikenal sebagai perintah dan larangan, pilihan antara melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dikenal dengan Al-ahka Al-khamsah; wajib, haram, sunnat, makruh, dan mubah. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini berdasarkan firman Allah surat Ali'Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ

أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya:

“ kamu (umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”

d. Prinsip kebebasan atau kemerdekaan (Al-Hurriyah)

Arti kebebasan meliputi kebebasan individual ataupun komunal; kebebasan beragama, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpolitik. Kebebasan individual meliputi kebebasan dalam melakukan atau tidak

melakukan suatu perbuatan. Kebebasan beragama Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Prinsip kebebasan ini menghendaki agar agama dan hukum Islam tidak disiakan berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan dan pernyataan yang meyakinkan.

e. Prinsip persamaan atau egalite (Al-Musawah)

Prinsip ini mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konstitusi madinah yang dikenal dengan A-Sahifah adalah contoh yang paling nyata pelaksanaan prinsip egalite dalam Islam, antara lain disebabkan dan pengisapan darah manusia atas manusia. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya;

“ wahai manusia sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha teliti.”

f. Prinsip tolong menolong (Ta'awun)

Prinsip ta'awun berarti bantu-membantu antara sesama anggota masyarakat. Bantu-membant ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam meningkatkan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah. Prinsip ini menghendaki kaum muslim untuk sling menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, sebagaimana dalam firman Allah surat A-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

“ dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolng dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

g. Prinsip toleransi (tasamuh)

Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa memandang ras dan warna kulit. Toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak telanggarnya hak-hak Islam dan umatnnya. Toleransi ini dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Peringatan Allah berkenaan dengan toleransi ini dinyatakan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

“Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”³⁵

Adapun dasar hukum dari kebijakan dalam islam adalah bersumber dari *dalil-dalil al-qur'an*.

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Artinya :

“sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul (muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikanmu, dan mengajarkan kepadamu kitab (al-qur'an) dan hikmah (sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.” (AL-Baqorah:151).³⁶

Sebagaimana (Kami telah Menyempurnakan Nikmat Kami kepadamu), Kami pun telah Mengutus kepada kalian seorang rasul di antara kalian, yang membacakan kepada kalian Ayat-ayat Kami dan menyucikan kalian serta mengajarkan kepada kalian al-Kitab dan hikmah, juga mengajarkan kepada kalian segala apa yang tidak kalian ketahui. *Kam arsaln fkum ras lan* (sebagaimana [Kami telah Menyempurnakan Nikmat Kami kepadamu] Kami pun telah Mengutus kepada kalian seorang rasul), yakni hendaklah kalian

³⁵ Ija Sutana, *politik hukum islam* (Bandung: cv pustaka setia, 2014), h.69-78.

³⁶ *Al-qur'anulkarim Tafsir Bil Hadis* (Bandung: Cordoba, 2013), h.23.

ingat kepada-Ku sebagaimana Kami telah Mengutus seorang rasul kepada kalian

Mingkum (di antara kalian), yakni dari nasab kalian. *Yatl 'alaikum* (yang membacakan kepada kalian), yakni menuturkan kepada kalian. *y tin* (Ayat-ayat Kami), yakni al-Quran, baik berupa perintah ataupun larangan. *Wa yuzakk kum* (dan menyucikan kalian), yakni membersihkan kalian dari berbagai dosa dengan tauhid, zakat, dan sedekah. *Wa yu'allimukumul kit ba* (serta mengajarkan kepada kalian al-Kitab), yakni al-Quran. *Wal hikmata* (dan hikmah), yakni halal dan haram. *Wa yu'allimukum* (juga mengajarkan kepada kalian) hukum-hukum, had, dan informasi tentang umat-umat terdahulu. *M lam tak n ta'lam n* (segala apa yang tidak kalian ketahui) sebelum adanya al-Quran dan Nabi Muhammad saw.

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَهْلَ الْاَلْبَابِ

Artinya :

“ Allah memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat ” (QS: al-Baqarah; 269).³⁷

Allah Menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, berarti ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan tiada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. *Yu'til hikmata may yasy -u* (Allah

³⁷ *Al-qur'anulkarim Tafsir Bil Hadis* (Bandung: Cordoba, 2013),h.45.ayat,269.

Menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dikehendaki-Nya), yakni Menganugerahkan kenabian kepada Muhammad saw.. Ada yang berpendapat, menganugerahkan penafsiran al-Quran. Menurut pendapat yang lain, kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan pemikiran. Wa may yu'tal hikmata (dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah), yakni kesesuaian antara perkataan, perbuatan, dan pemikiran. Fa qad tiya (berarti ia benar-benar telah dianugerahi) dan dikaruniai. Khairang kats r , wa m yadz-dzakkaru (karunia yang banyak. Dan tiada yang dapat mengambil pelajaran), yakni tak ada yang dapat mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan al-Quran. Menurut pendapat yang lain, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dari hikmah itu. Ill ulul alb b (kecuali orang-orang yang berakal), yakni orang-orang yang mempunyai nalar.³⁸

Islam adalah agama yang bijaksana dengan demikian, islam mengajarkan tentang kebijaksanaan. Dalam al-qur'an (atau dalam bahasa arab yang umumnya) bijaksana atau kebijaksanaan itu diartikan dengan kata khikmah atau al-khikmah, dan orang-orang yang bersikap atau bertindak dengan bijaksana itu biasa disebut dengan nama "hakim".

Dan apabila seorang pemimpin ingin mengambil suatu kebijakan maka buatlah kebijakan tersebut dengan sikap yang bijaksana, seperti yang dijelaskan pada ayat di atas bahwa allah akan menganugraahkan hikmah kepadanya.

³⁸ Al-qur'an tajwid terjemah dan tafsir, (penerbit ponegoro)

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

Artinya:

“ Allah memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat” (QS: al-Baqarah; 269).³⁹

Ada satu ajaran agama kita yang sebenarnya penting sekali, tetapi kita semua selaku umat Islam belum begitu memperhatikannya dengan baik atau belum menjadikannya sebagai satu pedoman bagi kehidupan kita, yaitu persoalan “kebijaksanaan”. Persoalan ini penting sekali, sebab mempunyai sumber hukum yang jelas dan kuat; banyak sekali ayat-ayat al-Qur’an atau hadits yang menjelaskan. Selain itu, hal bijaksana atau kebijaksanaan ini mempunyai pengaruh yang besar sekali pada sukses atau tidaknya hidup seseorang. Artinya baik atau tidaknya hidup kita, sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya sikap bijaksana ini; hidup kita bisa baik, sebab kita bertindak dengan bijaksana, sebaliknya hidup kita bisa hancur tak terkirakan, juga karena kita tidak bisa bertindak dengan bijaksana.

Islam adalah agama yang bijaksana dan, dengan demikian, Islam mengajarkan kebijaksanaan. Dalam al-Qur’an (atau dalam bahasa Arab umumnya), bijaksana atau kebijaksanaan ini disebut dengan “al-khikmah”,

³⁹ *Al-qur’anulkarim Tafsir Bil hadis*, (Bandung: Cordoba, 2013),h.45.ayat.269.

kemudian orang yang bersikap atau bertindak dengan disebut “hakim”. (kalau kita pernah mendengar sebutan “pak hakim” ini sebenarnya orang yang harus memutuskan perkara dengan bijaksana). Allah swt juga mempunyai sifat al-hakim, yang artinya maha bijaksana, (al-hakim ini termasuk asmaul husna). Sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-qur’an.

Al-Qur-an, kitab suci umat Islam, kitab suci kita semua, juga mempunyai sifat al-hakim , makanya sering kita dengar; al-Qur’anul hakim; artinya al-Qur’an yang bijaksana (misalnya disebutkan pada surat Yasin; 2: *yasin, wal-Qur’anil hakim* . Atau pada surat Luqman; 2: *alif lam mim, tilka ayatul kitabil hakim*). Semua ini menunjukkan bahwa al-Qur’an adalah kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran kebijaksanaan.

Semua nabi dan rasul, termasuk nabi muhammad saw diutus oleh Allah swt supaya mengajarkan persoalan kebijaksanaan, sebagaimana dijelaskan dalam al-qur’an:

كَمَا أَرْسَلْنَا نَبِيَّكُمْ سُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya:

“sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul (muhammad) dari (kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikanmu, dan mengajarkan kepadamu kitab (al-qur’an) dan hikmah (sunnah), serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.” (AL-Baqorah:151).⁴⁰

⁴⁰ *Al-qur’anulkarim Tafsir Bil Hadis* (Bandung: Cordoba, 2013),h.23.

Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat di atas, bahwa sesungguhnya rasul telah mengajarkan persoalan kebijaksanaan, dan menunjukkan bahwa al-qur'an adalah kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran kebijaksanaan.

Banyak sekali contoh-contoh kegagalan dalam hidup ini, hanya karena tidak didasari dengan sikap hidup bijaksana. Seorang pemimpin misalnya, akan hilang kewibawaannya, lalu didemonstrasi, malah dilengserkan, sebab tidak dapat bertindak dengan bijaksana. Kehidupan rumah tangga bisa gagal, tidak bisa rukun dan tidak bisa seiya sekata, sebab masing-masing tidak bertindak dengan bijaksana.

Begitulah, sikap yang tidak bijaksan yang bisa membuat semuanya menjadi hancur, apalagi untuk sebuah pemerintah apabila mengambil suatu kebijakan maka ambilah dengan sikap yang bijaksana. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh rasul kepada kita maka kita harus meniru atau menjalankan ajaran yang telah diajarkan kepada kita.

Abu hurairah Ra. Berkata, Rasulullah Saw, bersabda “barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Barang siapa yang mengajak kesesatan, maka baginya dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpu.” (HR muslim).

Dari hadis di atas jelaslah bahwa apabila seseorang yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala orang yang mengikutinya. Begitu pula dengan pemerintahan apabila mengambil suatu kebijakan dengan cara yang

bijaksana maka akan mendapatkan pahala begitupun dengan masyarakat yang mengikuti kebijakan tersebut.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung.

Sesungguhnya perjuangan partai politik tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia dalam menegakan, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan, demi terwujudnya cita – cita proklamasi. Untuk itu, dengan niat beribadah kepada ALLAH *Subhanahu wata'ala*, partai - partai politik yang berasas Islam yang terdiri atas Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, melalui deklarasi tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqa'dah 1392H, memfusikan kegiatan politiknya dalam satu partai politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunan. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan merupakan wahana perjuangan umat Islam Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bertakwa kepada ALLAH *Subhanahu wata'ala* dan mengokoahkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, menegakan supremasi hukum, serta menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan dan keadilan sosial berdasarkan pada nilai – nilai ke Islaman dan Pancasila. Pada tahun 1973 tidak berjauhan dari tingkat Dewan Pimpinana Pusat Partai Persatuan

Pembangunan maka didirikan juga Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Lampung oleh unsur - unsur partai – partai Islam yang ada pada waktu itu terdiri dari Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang merupakan fusi dibidang politik, sedangkan organisasi dan masa tetap didirikan sendiri – sendiri.

Dengan perkembangan situasi juga di pusat pada zaman Kepemimpinan Bapak H. Jailani Naro, fusi bidang politik di tingkatkan menjadi fusi tuntas, akibatnya organisasi - organisasi pendiri tadi keluar dari Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Persatuan Pembangunan berdiri sendiri, Pada zaman Kepemimpinan Bapak H. Jailani Naro seperti juga di pusat awalnya terjadi Dualisme Kepemimpinan di Partai Persatuan Pembangunan, kemudian Partai Persatuan pembangunan itu berdiri sendiri dan melakukan kegiatan – kegiatan sendiri, pada waktu berdiri sesuai dengan sifat fusinya hanya dibidang politik maka organisasi Partai Persatuan Pembangunan seperti konfidrasi dari unsur 4 pendiri. Di pusat ada lembaga kepresidenan partai yang anggotanya terdiri dari ketua – ketua partai pendiri, disamping kepengurusan ada tingkat pusat, lembaga kepresidenan dipimpin oleh Prof.Dr. Idham Kholid. Lembaga kepengurusan dipimpin oleh H. Jailani Naro di tingkat provinsi Lampung, dan seperti provinsi yang lain ada lembaga koordinator, ada lembaga pengurus harian. Ketua koordinator Lampung di pegang oleh bapak K.H.

Muhammad Zahri, ketua umum pengurus harian oleh bapak Mashul Dulhaq.

Lembaga kepemimpinan ini berjalan sampai dilaksanakannya fusi tuntas. Pada waktu pendirian Partai Persatuan pembangunan Lampung kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari empat dari Partai Nahdlatul Ulama, dua dari Partai Muslimin Indonesia, dua dari Partai Syarikat Islam Indonesia maka jumlah kursi Partai Persatuan Pembangunan di Dewan Perwakilan rakyat Daerah Lampung berjumlah delapan kursi.



Kemudian Pemilihan Umum	1977 : 10 Kursi
	1982 : 10 Kursi
	1987 : 3 Kursi
	1992 : 1 Kursi
	1997 : 2 Kursi
	1999 : 6 Kursi
	2004 : 4 Kursi
	2009 : 3 Kursi
	2014 : 4 kursi

Sejak tahun 1973 kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan Wilayah provinsi Lampung sampai saat ini masih tetap berjalan sejak kepemimpinan mulai dari bapak K.H Muhammad Zahri dilanjutkan oleh bapak Tahir Ransyah Karim kemudian dilanjutkan oleh bapak Sadiki Ya'qub kemudian dilanjutkan oleh bapak Malhani Manan

kemudian dilanjutkan oleh bapak Darwis Sani Merawi kemudian dilanjutkan oleh bapak M.C Imam Santoso kemudian dilanjutkan oleh bapak Hasanusi sampai saat ini.¹

Karakter dan model kepemimpinan masing – masing telah banyak mewarnai pencapaian tujuan partai politik. Sehingga Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan provinsi Lampung berganti tahun dan periode mengalami dinamika politik terhadap kemajuan atau keterpurukan Partai Persatuan Pembangunan provinsi Lampung. Dibawah kepemimpinan bapak Hasanusi selaku ketua Dewan Pimpinan Wilayah provinsi Lampung sekarang diharapkan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan provinsi Lampung bisa lebih maju lagi.

2. Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan provinsi Lampung

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan provinsi Lampung saat ini diketuai oleh bapak Hasanusi serta sekretaris nya bapak Azazi, selengkapnya struktur organisasi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan provinsi Lampung.

Dengan terbentuknya Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung Masa bakti tahun 2016 – 2021 di harapkan dapat menjalankan Anggaran dasar Anggaran Rumah Tangga partai sebagai landasan setiap anggota, kader

¹ H. Malhani Manan, (Wawancara, 10 Oktober 2018 pukul 13.00 WIB di kantor DPW PPP).

dalam melaksanakan fungsinya selaku partai politik, dan dapat mencapai tujuan partai sebagai wujud keberhasilan dan kemajuan suatu organisasi partai politik yang mempunyai dampak positif di kalangan masyarakat maupun internal partai di bawah kepemimpinan bapak Hasunusi.

3. Keadaan Demografi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung

Dewan Pimpinan Wilayah provinsi Lampung yang merupakan bagian struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat yang termasuk struktur kepengurusan tingkat provinsi yang berada di wilayah Lampung, yang bertugas melaksanakan fungsinya selaku partai politik yang berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan tujuan Partai Persatuan Pembangunan adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir – batin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dibawah ridho Allah *Subhanahu Wata'ala*. Sehingga Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan provinsi Lampung mempunyai tanggung jawab besar untuk mewujudkan tujuan partai tersebut.

Dengan perkembangan situasi, partai politik mengalami persaingan terhadap partai – partai politik lainnya, dalam hal kontestasi Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Untuk itu Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan provinsi Lampung persiapan yang perlu dilakukan baik sebagai peserta Pemilihan Umum maupun Pemilihan

Kepala Daerah, harus meningkatkan kemampuan organisasi para kader Partai Persatuan Pembangunan yang ada, karena kemajuan suatu organisasi tergantung kepada ketokohan para pengurus partai tersebut. Apabila para pengurus partai memiliki pengaruh yang besar ataupun mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sudah barang tentu organisasi partai tersebut akan memiliki masa pendukung yang sangat banyak dan solid. Namun pada kenyataannya para pengurus partai politik atau organisasi partai politik banyak dicerai oleh pengurus itu sendiri, baik dalam hal kemampuannya yang sangat tidak memadai dalam menjalankan tugasnya dalam partai politik, yakni dalam hal keilmuan, pemahaman serta pengalamannya dalam organisasi partai politik ataupun dalam hal moralnya sebagai pejabat publik yang salah mempergunakan kekuasaan yang dia miliki sehingga merugikan organisasi partai politik demi kepentingannya pribadi terlebih belakangan ini banyak para petinggi – petinggi politik yang tertangkap dan terbukti melakukan tindak pidana khusus ataupun tindak pidana umum, akibatnya para pengurus partai politik yang seharusnya memberikan contoh teladan yang baik kepada masyarakat yang memegang kepercayaan rakyat baik sebagai kepala daerah maupun sebagai wakil rakyat mengalami krisis kepercayaan terhadap tokoh – tokoh partai politik. ²

Maka dengan ini Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan provinsi Lampung dalam merekrut kepengurusan Dewan

² Azazie, (Wawancara, 17 Oktober pukul 14.30 WIB di DPW PPP).

Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan provinsi Lampung sampai kepengurusan ranting tingkat desa melakukan kaderisasi kepada masyarakat yang ingin bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan agar dapat memahami terlebih dahulu Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan terutama tujuan Partai Persatuan Pembangunan, dengan demikian kemampuan anggota atau kader partai untuk mencapai tujuan organisasi partai politik dapat ditingkatkan.

Dewan Pimpinan Wilayah provinsi Lampung sebagai partai pendukung pemerintah daerah provinsi Lampung dapat melaksanakan fungsinya selaku partai politik dalam menyelesaikan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat sangat mempengaruhi dalam hal politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh pemerintahan terhadap pihak – pihak terkait. Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan provinsi Lampung selaku partai politik adalah sebagai jembatan sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat dan dipihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara dalam suatu bursa ide – ide, kadang – kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat partai politik bertindak sebagai pengeras suara. Dewan Pimpinan Wilayah provinsi Lampung dalam melaksanakan peran dan fungsinya terhadap kebijakan pemerintah

provinsi Lampung harus terlibat dalam hal perumusan peraturan daerah ataupun peraturan Gubernur Lampung, juga dalam hal pengawasan dan penetapan anggaran Partai Persatuan Pembangunan dengan melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung yakni :

1. Bapak M.C. Imam Santoso
2. Ibu Hj. Zildayati
3. Bapak Hi. Hali Fahmi Almarosy
4. Bapak Abdul Haris

Maka Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan provinsi Lampung dapat melaksanakan fungsinya sebagai partai politik dengan melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Perasatuan Pembangunan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Lampung untuk melakukan pencapaian tujuan partai politik dengan melalui lembaga Legislatif ditingkat kabupaten atau kota disetiap kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan untuk mendapatkan kursi. Pada saat ini hasil Pemilihan Umum 2014 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat kabupaten atau kota seprovinsi Lampung yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan yakni sebagai Berikut :

1. Kota Bandar Lampung : 4 Kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
2. Kabupaten Lampung Selatan : 0 Kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
3. Kabupaten Lampung Tengah : 1 Kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
4. Kabupaten Lampung Utara : 0 Kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
5. Kabupaten Lampung Barat : 2 Kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
6. Kabupaten Tulang Bawang : 1 Kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
7. Kabupaten Tanggamus : 4 Kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
8. Kabupaten Way Kanan : 2 Kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
9. Kabupaten Lampung Timur : 0 Kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
10. Kota Metro : 0 Kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
11. Kabupaten Pesawaran : 3 Kursi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 12. Kabupaten Pringsewu | : 3 Kursi Dewan |
| Perwakilan Rakyat Daerah | |
| 13. Kabupaten Mesuji | : 0 Kursi Dewan |
| Perwakilan Rakyat Daerah | |
| 14. Kabupaten Tulang Bawang Barat | : 1 Kursi Dewan |
| Perwakilan Rakyat Daerah | |
| 15. Kabupaten Pesisir Barat | : 2 Kursi Dewan |
| Perwakilan Rakyat Daerah | |

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014 pencapaian kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau kota dari Partai Persatuan Persatuan masih terdapatnya Kabupaten atau kota yang tidak memperoleh kursi di lembaga legislatif, oleh karena itu Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Lampung harus melakukan evaluasi terhadap kinerja kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang di berbagai daerah tingkat kabupaten atau kota supaya apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan dalam mengikuti kontestasi Pemilihan Umum selanjutnya tidak terjadi kembali, karena pencapaian kursi di lembaga legislatif sangatlah berdampak terhadap kemajuan atau kemunduran suatu organisasi partai politik.

B. Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung

1. Arti Penting Kebijakan

Kebijakan merupakan kata yang sering kita dengar, kita ucapkan atau bahkan kita lakukan. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan mengambil keputusan.

Kata kebijakan itu berasal dari Bahasa Indonesia sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah '*policy*'.

Adapun pengertian kebijakan itu sendiri dapat dilihat dari segi bahasa yaitu kebijakan atau *policy* yang berasal dari Bahasa Inggris artinya “kebijaksanaan” (Wisdom) maupun “kebijakan” (virtues).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988) mengemukakan bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.

2. Visi dan Misi Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung

a. Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan. Secara ontologism, visi merupakan *dos sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh

stake holders dan terkristalisasi sebagai jati diri. Visi umumnya dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stake holders* untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan *stake holders* untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategis, energy masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Provinsi Lampung ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stake holders*) di daerah Lampung.

b. Misi

Misi adalah upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan visi. Dalam organisasi pemerintah daerah, misi menjadi *direction* untuk tugas-tugas yang harus diemban oleh satuan kerja. Dalam upaya mewujudkan Visi Provinsi Lampung dapat dilaksanakan melalui misi berikut :

1. Menumbuhkembangkan dan pemeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global.

2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
3. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEK, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
4. Membangun masyarakat religious, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.
5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari.
6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertata kelola yang baik.

Misi - 1 : Menumbuhkembangkan dan pemeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global.

Misi ini adalah upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru di sector riil harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja.

Kebijakan pemerataan ekonomi harus tercermin proporsi asset produktif seperti tanah oleh UKM. Pembangunan ekonomi dan

pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan. Perda nomor 15 tahun 2014

Misi - 2 : Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.

Misi ini adalah upaya menambah dan meningkatkan kualitas dan cakupan infrastruktur (transportasi, darat, air, sungai, dan udara, energy dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi regional dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan insfrastruktur untuk meningkatkan pelayanan social, terutama kebutuhan dasar masyarakat juga diorientasikan untuk menarik investasi. Perda nomor 08 Tahun 2015 tentang sarana dan prasarana.

Misi – 3 : Membangun pendidikan, penguasaan IPTEK, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Misi ini adalah upaya memperkuat daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melaksanakan pendidikan berkualitas di semua jalur, jenis, dan jenjang. Peningkatan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan IPTEK diprioritaskan pada semua sector pembangunan. Pengembangan SDM berkualitas harus didukung oleh

peningkatam pelayanan kesehatan keolahragaan. Bagi golongan masyarakat kurang mampu peningkatan kualitas SDM harus didukung oleh pelayanan kesejahteraan social yang memadai. Perda nomor 5 tahun 2016 tentang Kesehatan dan Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pendidikan

Misi – 4 : Membangun masyarakat religious, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.

Misi ini adalah upaya memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pendidikan agama yang berkualitas di dalam dan di luar sekolah. Peningkatan pelayanan keagamaan secara luas untuk meningkatkan kualitas pribadi dari masyarakat dengan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama perlu diperkuat karakter atau jati diri masyarakat yang mengaktualisasikan budi pekerti luhur dan nilai-nilai luhur budaya daerah serta mampu berinteraksi antar budaya. Perda Nomor 2 Tahun 2016 Pemberdayaan Masyarakat desa

Misi – 5 : Mewujudkan daerah yang asri dan lestari.

Misi ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan dan pemanfaatan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan.

Meningkatkan pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Meningkatkan pemanfaatan nilai ekonomis sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan dengan meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan pada semua fasilitas umum, social, dan wilayah pemukiman. Perda Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan air dan tanah

Misi – 6 : Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis.

Misi ini adalah upaya untuk mendukung pemantapan kemampuan dan peningkatan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan menegakkan hukum serta memberantas praktik-praktik birokrasi yang sarat KKN. Perda Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Supremasi Hukum

Misi – 7 : Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertata kelola yang baik.

Misi ini adalah upaya mewujudkan pemerintah daerah bertata kelola baik, sehingga terwujud pemerintah yang bersih (bebas KKN), berwibawa, bertanggung jawab, dan professional. Dalam kaitan ini perlu diperkuat desentralisasi pemerintah atau otonomi daerah serta keserasian dan keterpaduan pembagian tugas pelayanan antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Mewujudkan pemerintah daerah yang berorientasi pada kewirausahaan (entrepreneurial government) yang mendorong inovasi dalam manajemen pemerintahan untuk pelayanan lebih baik kepada masyarakat dan dunia usaha. Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

3. Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2014-2019

Dalam menjalankan roda pemerintahan selaku jabatan eksekutif pemerintah provinsi Lampung baik dalam peraturan daerah maupun peraturan gubernur harus mengacu terhadap visi dan misi yang telah disusun terutama program kerja jangka pendek, program kerja jangka menengah, program kerja jangka panjang. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan pemerintah provinsi Lampung tersebut tepat sasaran, transparan, dan berkesinambungan sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Lampung dapat dijalankan dengan baik.

Pemerintah provinsi Lampung dalam mewujudkan visi misinya untuk kepentingan masyarakat dengan melalui kebijakan yang diambil tertuang dalam peraturan daerah maupun peraturan gubernur sesuai aspirasi yang disampaikan melalui lembaga legislatif salah satunya yaitu kebijakan yang tertuang pada Peraturan Daerah No 08 tahun 2015 tentang Sarana dan Prasarana.

Dengan adanya Peraturan Daerah No 08 Tahun 2015 tentang Sarana dan Prasarana, dapat mendukung pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan sosial yang lebih baik, juga dapat meningkatkan perekonomian dan pengembangan ekonomi untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Apabila pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial sudah baik maka ekonomi masyarakat akan meningkat.

C. Peran Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014-2016.

Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Untuk menjalankan fungsinya selaku partai politik Partai Persatuan Pembangunan melaksanakan perannya terhadap kebijakan pemerintah provinsi Lampung, baik melalui

peraturan daerah maupun peraturan gubernur Lampung agar kemudian apa yang telah dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan benar – benar terealisasi.³

PPP adalah tempat bernaung atau berlindung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PPP merupakan partai yang paling gigih memperjuangkan aspirasi umat Islam. Hal ini dilakukan sejak PPP berdiri sampai kini. “Sebagai kompensasi atas berdirinya PPP sebagai partai Islam, maka PPP meredam keinginan sebagian umat Islam itu sendiri untuk mendirikan negara Islam atau mengganti Pancasila dengan asas Islam. Karena ternyata dalam negara Pancasila masih dimungkinkan berdirinya partai Islam yang mempunyai kebebasan memperjuangkan aspirasi umat Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, keberadaan PPP dalam konteks NKRI sangat penting.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus partai persatuan pembangunan beliau mengatakan bahwa, “Peran Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai politik yang berasaskan Islam”.⁵ Dengan karakter mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam melakukan peranannya sebagai partai politik terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

³ Anita Novianti, (Wawancara, 18 Oktober 2018 pukul 09.30 WIB di DPW PPP)

⁴ Yohanson, (Wawancara 18 oktober 2018 pukul 11.00 WIB di DPW PPP)

⁵ Azazie, (wawancara, 19 Oktober 2018 pukul 13.00 di DPW PPP)

Peran Partai Persatuan Pembangunan adalah suatu kewajiban baginya untuk memperjuangkan dan mendukung kepentingan umat islam, yaitu :

1. Mengevaluasi
2. Mencermati
3. Membentengi.⁶

Dalam kaitannya tentang kebijakan pemerintah provinsi Lampung apabila bertentangan dengan nilai – nilai Islam., maka partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan, usul kebijakan ini dimasukkan kedalam program pemerintah daerah untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum”.⁷

Kemudian setelah Partai Persatuan Pembangunan memperjuangkan aspirasi umat dengan melalui usul kebijakan yang disahkan menjadi peraturan daerah maupun peraturan gubernur Lampung. Partai Persatuan Pembangunan mendukung kebijakan tersebut dengan bentuk memperbincangkan dan menyebarluaskan kebijakan – kebijakan pemerintah provinsi Lampung, sehingga kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan penuh oleh masyarakat banyak agar terciptanya masyarakat yang bermartabat dan religius, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan nilai – nilai norma agama, demi menegakkan demokrasi serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

⁶ Malhani Manan, (Wawancara, 19 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB di DPW PPP)

⁷ H.Ali Fahmi, (Wawancara, 19 Oktober 2018 pukul 15.30 WIB di DPW PPP).

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.⁸

Selain itu menurut pengurus Partai Pembangunan Persatuan, ia menuturkan bahwa, "Kebijakan pemerintah provinsi Lampung telah dilaksanakan dalam hal ini, Partai Persatuan Pembangunan melaksanakan fungsinya selaku partai politik yakni pengawasan, maka pengawasan ini yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk melakukan evaluasi, mencermati serta membentengi apabila adanya kendala atau penghambat yang terjadi di masyarakat, baik berdampak positif ataupun negatif, diterima atau ditolak oleh masyarakat, maka Partai Persatuan Pembangunan perlu melakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan pemerintah provinsi Lampung, untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan kondusif"⁹.

⁸ Dedi Mulyadi, (Wawancara 19 Oktober 2018 pukul 14.30 di DPW PPP)

⁹ Hasanusi, ,(Wawancara , 19 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB di DPW PPP)

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Peran Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung

Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, bangsa, dan negara melalui Pemilihan Umum. Bahwa sesungguhnya perjuangan partai politik tidak terpisahkan dari segala perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan, mempertahankan serta dalam mengisi kemerdekaan. Bahwa kemerdekaan yang di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah berkat rahmat Allah *Subhanahu Wata'ala* dan merupakan jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur yang di ridhoi Allah *Subhanahu Wata'ala* dengan melaksanakan pembangunan spiritual dan material di segala aspek kehidupan.

Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan itu partai – partai politik sebagai modal dasar pembangunan dan potensi efektif bangsa sangat penting perannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka Partai Persatuan Pembangunan merupakan wadah perjuangan umat islam untuk menegakkan demokrasi serta mewujudkan keadilan sosial dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Dalam praktiknya ada empat fungsi partai politik. *Pertama*, partai sebagai sarana komunikasi politik. Partai menyalurkan beragam pendapat dan aspirasi masyarakat. Partai melakukan penggabungan kepentingan masyarakat dan merumuskan kepentingan tersebut dalam bentuk yang teratur. Rumusan ini dibuat sebagai koreksi terhadap kebijakan penguasa atau usulan kebijakan yang disampaikan kepada penguasa untuk dijadikan kebijakan umum yang diterapkan kepada masyarakat.

Kedua, partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai memberikan sikap, pandangan, pendapat, dan orientasi terhadap fenomena (kejadian, peristiwa, dan kebijakan) politik yang terjadi ditengah masyarakat. Sosialisasi politik mencakup juga proses menyampaikan norma – norma dan nilai – nilai dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Bahkan, partai politik berusaha menciptakan *image* (citra) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum.

Ketiga, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik berfungsi mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai.

Keempat, partai politik sebagai sarana pengatur konflik. Ditengah masyarakat terjadi berbagai perbedaan pendapat, partai politik berupaya untuk mengatasinya. Akan tetapi, semestinya hal ini dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi atau partai itu sendiri, melainkan untuk kepentingan umum.

Selaku partai politik Partai Persatuan Pembangunan yang mempunyai peranan penting terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah provinsi Lampung, harus mampu untuk menjembatani apa yang menjadi program pemerintah daerah yang harus disampaikan kepada masyarakat, begitupun sebaliknya Partai Persatuan Pembangunan harus mampu untuk menjembatani apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang harus disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi Lampung dengan melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Persatuan Pembangunan.

Untuk itu Partai Persatuan Pembangunan melaksanakan fungsinya selaku partai politik terhadap kebijakan pemerintah provinsi Lampung dengan melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Lampung dari Partai Persatuan Pembangunan melaksanakan perannya sebagai berikut :

1. Partai Persatuan Pembangunan mendukung program pemerintah daerah yang berpihak kepada kepentingan Islam dan membentengi kebijakan pemerintah daerah apabila jauh dari nilai – nilai Islam.
2. Partai Persatuan Pembangunan memperjuangkan untuk kepentingan umat, dengan melalui komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Persatuan Pembangunan.
3. Partai Persatuan Pembangunan memantau, mencermati, serta mengevaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah provinsi Lampung.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Partai Persatuan Pembangunan pada Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung

Islam adalah agama yang bijaksana dan, dengan demikian, Islam mengajarkan kebijaksanaan. Dalam al-Qur'an (atau dalam bahasa Arab umumnya), bijaksana atau kebijaksanaan ini disebut dengan “al-khikmah”, kemudian orang yang bersikap atau bertindak dengan disebut “hakim”. (kalau kita pernah mendengar sebutan “pak hakim” ini sebenarnya orang yang harus memutuskan perkara dengan bijaksana). Allah swt juga mempunyai sifat al-hakim, yang artinya maha bijaksana, (al-hakim ini termasuk asmaul husna). Sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-qur'an.

Dalam kaitannya tentang kebijakan pemerintah provinsi Lampung apabila bertentangan dengan nilai – nilai Islam, berdasarkan firman Allah surat Ali'Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ .

Artinya;

“ kamu (umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”

maka partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan, usul kebijakan ini dimasukkan kedalam program pemerintah daerah untuk

diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum”.

Selain itu, dalam pandangan Hukum Islam Partai Persatuan Pembangunan sesuai dengan nilai-nilai Islam , dalam mengawal kebijakan – kebijakan pemerintah provinsi Lampung, sebab Partai Persatuan Pembangunan merupakan organisasi Islam yang benar dalam menyuarakan kepentingan umat Islam dan perjuangan umat Islam Indonesia.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam skripsi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Partai Persatuan Pembangunan telah melakukan Fungsinya selaku partai politik terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung baik berupa peraturan daerah maupun peraturan Gubernur, sesuai dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu:
 - a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Dalam pandangan hukum Islam peran yang sudah dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa terdapat banyak kebijakan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lampung sehingga adanya komunikasi yang kuat baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah sehingga menghasilkan kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyat di Provinsi Lampung). Untuk mengatasi hal tersebut ada beberapa saran yang dianggap penting untuk penulis sampaikan.

1. Jika kedepannya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ingin kembali terjadi berperan terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Lampung maka harus memunculkan ide terkait pembangunan yang ada di Provinsi Lampung.
2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) perlu mengadakan dialog demokrasi di dalam tubuh partai, sehingga nantinya mulai dari tingkat pusat, wilayah, sampai ke daerah bisa meresapi berbagai prinsip dan kebijakan yang berlaku di internal partai.
3. Dalam upaya membesarkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan pencapaian tujuan memenangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu perlu kiranya para pengurus, anggota, dan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersatu kembali dan mendahulukan kepentingan Partai di atas kepentingan pribadi untuk menjalankan kembali Visi Misi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Ke Implementasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Al-Qur'anulkarim Tafsir Bil Hadis*, Bandung: Cordoba, 2013
- Ayi Sofyan, *Etika Politik islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Basrowi. Sukidin dan Suko Susilo, *Sosiologi Politik* , Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Cholid Narbuka dan Abu Ahcmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012, cet 12
- Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Public*, Bandung: CV. Alfabeta, 2015.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Erik Purnama Putra, "Persentase Umat Islam di Indonesia jadi 85 Persen" (Online), tersedia di [http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/09/o0ow4v334-persentase umat Islam di Indonesia jadi 85 persen.html](http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/09/o0ow4v334-persentase%20umat%20Islam%20di%20Indonesia%20jadi%2085%20persen.html) (17 November 2016), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- Hamdan Zulva " *Partai Politik Islam*, Diakses melalui <https://hamdanzoelva.wordpress.com>, (04 November 2016), dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- H.Ali Fahmi, *Peran Partai Persatuan Pembangunan*, (Wawancara, 19 Oktober 2018).
- Hasanusi, H.Ali Fahmi, *Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung*, (Wawancara , 19 Oktober 2018)
- Ija Sutana, *Politik Hukum Islam*, Bandung: cv pustaka setia, 2014.
- Irawan Soehartono, *Metode Peelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995,

Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* , Bandung: Alumni, 2008.

Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 2008.

Kumpulan Pengertian Menurut Para Ahli” (On-line), tersedia di:
<http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-peran-menurut-para-ahli.html?m=1>

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2007.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* , Jakara: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Muhammad, *Kebijakan Fiskal Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Selemba Empat, 2002

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana ,2014.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* ,Depok : PT Rajagrafindo Persada,2014

Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* ,Bandung: Alfabeta, Cet-16, 2012.

Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ,Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Syaiful Sagala, *administrasi pendidikan kontemporer* ,Bandung: Alfabeta, 2009

Lampiran

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 2016 – 2021



Ketua	: Hasanusi, BBA.
Wakil Ketua Bid. Politik dan Pemerintahan	: Drs. Eka Cidandra
Wakil Ketua Bid. Agama dan Dakwah	: AK. Yohanson,
S.Ag, MM.	
Wakil Ketua Bid. Organisasi, Keanggotaan dan	: Drs. Hanafi Aman,
ST.	
Kaderisasi	
Wakil Ketua Bid. Pemenangan Pemilu	: Hi. Ali Fahmi
Almarosyi, SE, AK.	
Wakil Ketua Bid. Pemuda dan Olahraga	: Endang Asnawi,
S.Sos.	
Wakil Ketua Bid. Hubungan Antar Lembaga	: Mega Putra, SE.
Wakil Ketua Bid. Pendidikan dan Kebudayaan	: Hi. Marwan Salta

Wakil Ketua Bid. Advokasi Hukum dan HAM : Dr. Yusnani Hasyim
Zum, SH, M. Hum.

Wakil Ketua Bid. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh : Hi. M. Hasyim Idrus
dan Wakaf

Wakil Ketua Bid. Kesehatan dan Kesejahteraan : Nasrulloh, SE.

Wakil Ketua Bid. Pemberdayaan Perempuan dan : Hj. Zelda Yati
Perlindungan Anak

Wakil Ketua Bid. Pengembangan Koperasi : Harsani Merawi, SH.
dan Kewirausahaan

Wakil Ketua Bid. Komunikasi dan Hubungan Media : Dedi Mulyadi, SH.

Wakil Ketua Bid. Penanggulangan Bencana Alam : Drs. Kirnali M. Yus,
MM.

Wakil Ketua Bid. Teknologi dan Informasi : Muhammad K.
Anwar, M. Pd.I.

Sekretaris : P. Azazie, STGD,
SE.

Wakil Sekretaris Bid. Politik dan Pemerintahan : A. Saltud, SE.

Wakil Sekretaris Bid. Agama dan Dakwah : Muharom

Wakil Sekretaris Bid. Organisasi, Keanggotaan dan kaderisasi : Irfandi
Romas, SE.

Wakil Sekretaris Bid. Pemenangan Pemilu Cabang : Drs. Gogor
Siguntang, M.Si.

Wakil Sekretaris Bid. Pemuda dan Olahraga : Yenny Marliani Asik

Wakil Sekretaris Bid. Hubungan Antar Lembaga : Hi. Nurbakti Efendi,
SE.

Wakil Sekretaris Bid. Pendidikan dan Kebudayaan : Hj. Kusuma Wati

Wakil Sekretaris Bid. Advokasi Hukum dan HAM : Qoyimah, S, Pd.

Wakil Sekretaris Bid. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh : Ibnu Hajar, SE.
dan Wakaf

Wakil Sekretaris Bid. Kesehatan dan Kesejahteraan : Feria Sari

Wakil Sekretaris Bid. Pemberdayaan Perempuan dan : Anita Novianti
Perlindungan Anak

Wakil Sekretaris Bid. Pengembangan Koperasi : Dian Herlambang,
SH, MH.
dan Kewirausahaan

Wakil Sekretaris Bid. Komunikasi dan Hubungan Media : Yuni Saihun

Wakil Sekretaris Bid. Penanggulangan Bencana Alam : M. Yusuf Budiono

Wakil Sekretaris Bid. Teknologi dan Informasi : Ny. Tini Marliana,
SS, MM.

Bendahara : **Ibrahim Ibnu**

Idham

Wakil Bendahara : Unila Sari

Wakil Bendahara : Hesti Astrida

SUSUNAN DAN PERSONALIA

PIMPINAN MAJELIS SYARIAH DEWAN PIMPINAN WILAYAH

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 2016 – 2021

Ketua : **K.H Daroni Ali,**
S.Ag, M.Si

Wakil Ketua : K.H Zaheran Syah

Wakil Ketua : Ust. Ahmad Sartani

Wakil Ketua : Iwan Setya Budi,
S.Pdi, M.Pdi

Sekretaris : **Ust.Idhan Kholid**

Wakil Sekretaris : Ust. Abuzar

Wakil Sekretaris : Ust. Solihin

Wakil Sekretaris : Ust. Rifa'i

Wakil Sekretaris : Ust. Daswik

SUSUNAN DAN PERSONALIA

PIMPINAN MAJELIS PERTIMBANGAN DEWAN PIMPINAN

WILAYAH

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 2016 – 2021

Ketua : Hi.Malhani Manan

Wakil Ketua : Drs. Marlan Aziz

Wakil Ketua : Abdul Kadir Hafied

Wakil Ketua : Hi. Joni Pahlawan,
SE, MM.

Wakil Ketua : Ust. Jafar Sidik

Wakil Ketua : Hi.Bakarudin MR.

Sekretaris

: M. Fadoli, S.Pd.I,

M.Pd.I.

Wakil Sekretaris

: A. Kadir Rifa'i,

S.Sos.

Wakil Sekretaris

: Hi. Djamsari A.

Ghani

Wakil Sekretaris

: Ust. Abu Sofyan

Wakil sekretaris

: Ust. M. Rois



**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PARTAI
PERSATUAN PEMBANGUNAN TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014-2019**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Program Studi Siyasah Syar'iyah

Oleh :

ILHAM SAFRONI

NPM. 1221020015

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Pembimbing I : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I

Pembimbing II: Eko Hidayat, S.Sos., M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamualaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi, No 156 Sumur Putri, Teluk
Betung Utara, Kota BandarLampung. Propinsi Lampung

Menerangkan bahwa:

Nama : Ilham Safroni

NPM : 1221020015

Fakultas/jur : Syari'ah/Siyasah

Semester : 13

Benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Partai Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2019”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Teluk Betung Utara, Oktober 2018

.....



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

BLANKO KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Ilham Safroni
NPM : 1221020015
PEMBIMBING I : Drs.Susiadi AS.M.Sos.I
PEMBIMBING II : Eko Hidayat.S.Sos.,M.H
**Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Partai
Persatuan Pembangunan Terhadap Kebijakan
Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 - 2016**

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI KONSULTASI	PARAF	
			Pembimbing 1	Pembimbing II
1	9 Januari 2018	Konsultasi Bab I ke pembimbing II		
2	20 Januari 2018	Acc Bab I dilanjutkan ke Bab – bab berikutnya dan dilanjutkan konsultasi ke pembimbing I		
3	30 April 2018	Perbaikan penulisan, latar belakang, dan penambahan referensi		
4	15 Mei 2018	Perbaikan penulisan, metode pengumpulan dan analisa data		
5	30 juni 2018	Acc Bab I dilanjutkan ke Bab – bab berikutnya		
6	10 September 2018	Perbaikan Bab II		
7	18 November 2018	Acc Bab II		
8	15 Januari 2019	Perbaikan Bab III dan IV		

9	20 Februari 2019	Perbaiki Bab III dan IV		
10	20 Juni 2019	Perbaiki Bab V		
11	27 Juni 2019	Acc Bab II Sampai Bab V		
12	28 Juni 2019	Perbaiki Bab II sampai Bab V		
13	3 Juli 2019	Acc Bab II Sampai V		

Bandar Lampung, 10 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs.Susiadi AS.M.Sos.I
NIP.195808171993031002

Eko Hidayat.S.sos.,M.H
NIP.197512302003121002

